

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sebuah keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan, di ukur dari segi kualitas, kuantitas dan waktu yang direncanakan sebelumnya. Menurut KBBI validitas ialah kegunaan, aktivitas, dan adanya kesepakatan dalam aktivitas antara seseorang yang melakukan suatu tugas dengan tujuan untuk mencapainya.

Steers (Sutrisno, 2011, hlm. 123) mengatakan, efektivitas pada umumnya hanya terkait dengan tujuan organisasi, yaitu keuntungan, dan cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan proses: orang. Sumanth (Darsono & Siswandoko, 2011, hlm. 196) mengatakan, efektivitasnya adalah seberapa baik pencapaian tujuannya dibandingkan dengan apa yang dapat dicapai dengan tetap menjaga kualitas. Menurut Stoner (Darsono & Siswandoko, 2011, hlm. 196), pengertian efektivitas adalah suatu konsep luas yang mencakup berbagai faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarnya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena dapat menguraikan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Atau, validitas adalah tujuan aktivasi yang dilakukan sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun pengertian efektivitas menurut beberapa ahli, yaitu:

- a. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya (Hidayat, 1986). Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasi kegiatan program atau misi)

suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Agung Kurniawan, 2005:109).

- b. Efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut (Effendy, 2008).

Dari beberapa pengertian tersebut efektivitas diatas dapat disimpulkan, bahwa secara umum efektivitas bisa diartikan sebagai adanya suatu dampak, dampak, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi imbas atau pesan tapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, profesionalitas, penetapan target, keberadaan acara, materi, berkaitan dengan metode atau cara sasaran atau fasilitas serta dapat memberikan dampak terhadap tujuan yang akan dicapai.

b. Ukuran Efektivitas

Karena keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih merupakan keluaran tidak berwujud (*intangibile*) yang sulit diukur, mengukur efektivitas sering menghadapi tantangan. Kesulitan dalam memperkirakan kelangsungan hidup adalah karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui secara sementara, namun dalam jangka panjang setelah program berhasil, maka ukuran-ukuran kelangsungan hidup umumnya dikomunikasikan secara subjektif (dilihat dari nilai) sebagai penilaian, maksudnya jika kualitas yang diciptakan bagus, maka kelangsungan hidup juga bagus.

Berikut ini dikemukakan penjelasan ukuran atau kriteria efektivitas menurut (Gibson dkk, 1989 : 34) indikator efektivitas dapat diukur :

1. Produktivitas yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

3. Efisiensi yaitu merupakan perbandingan (ratio) antara *output* dengan *input*.
4. Fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi.
5. Kepuasan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada.
7. Pengembangan yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

c. Efektivitas Organisasi

Pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia, dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan (Steers dalam Sutrisno, 2011).

- a. Optimalisasi Tujuan disini efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Jika pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai berjalan optimal, maka akan memungkinkan dikenalnya secara jelas berbagai tujuan yang sering saling berlawanan, sekaligus dapat diketahui hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- b. Perspektif Sistem disini efektivitas dinilai dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan mengikuti pola, input, konversi, output, dan umpan balik, dan mengikut sertakan lingkungan sebagai faktor eksternal sistem, tujuan tidak diperlakukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi lebih sebagai sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai berjalannya waktu. Dan juga dengan tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu akan dapat diperlakukan sebagai input baru untuk penetapan tujuan selanjutnya. Jadi dengan

begitu tujuan akan mengikuti daur yang saling berhubungan antar komponen, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal.

- c. Perspektif Perilaku Manusia disini efektivitas dinilai berdasarkan pada perilaku personil-personil yang ada di dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Dalam hal ini dilakukan pengintegrasian antara tingkah laku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui tingkah laku dari personil-personil yang ada di dalam organisasi tersebut.

2. Elektronik Voting (E-Voting)

a. Pengertian Elektronik Voting (E-Voting)

Pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi mempermudah berbagai macam aktivitas warga Indonesia sebagai Negara berkembang sangat merasakan konsekuensi dari kemajuan teknologi. Hampir semua aspek kehidupan sehari-hari kita sebagai rakyat di dominasi oleh teknologi.

Teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakanakan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indra, dan otak manusia, pendapat Ellul sejalan dengan Alisyahbana dalam Miarso (2007b, hlm. 131). Dalam bidang pendidikan, banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi. Salah satunya menggunakan penerapan sistem E-Voting pada pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) di tingkat persekolahan.

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005, hlm. 2). Sedangkan e-voting adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan (Husni Fahmi & Dwi

Handoko, 2010). Elektronik Voting (e-voting) atau pemungutan suara elektro, menjadi proses pemungutan suara yang memungkinkan pemilihan untuk dapat menyampaikan suara secara aman dan rahasia melalui internet. Penerapan e-voting bertujuan untuk mempermudah proses pemilihan sebab menggunakan e-voting ini dapat menghemat waktu, biaya, dan penggunaan kertas. Inti dari e-voting sendiri artinya praktik pemungutan suara secara digital dimulai dari pendaftaran pemilih, jalannya pemilihan, proses penghitungan suara, serta pengiriman akibat akhir suara yang telah diterima.

Menurut Kahani dalam Priyono & Dihan (2010c, hlm. E56) "*E-Voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballots in an election*". Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-voting pada dasarnya proses pemungutan suara yang penggunaannya berbasis komputer ataupun media elektronik lainnya. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian E-Voting menurut Magi & Buldas dalam Priyono & Dihan (2010).

"Electronic Voting (E-Voting) is any voting method where the voter's intention is expressed or collected by electronic means. There are considered the following electronic voting way".

Berdasarkan pernyataan tersebut E-Voting merupakan pemungutan suara dimana niat pemilih disalurkan dengan metode pengumpulan suara yang dilakukan dengan cara elektronik. Pengertian lain menurut Zafar & Pilkjaer dalam Priyono & Dihan (2010f, hlm. E57) adalah:

"E-Voting combines technology with the democratic proses, in order to make voting more efficient and convenient for voters. E-Voting allows voters to either vote by computer from their homes or at the polling station"

Berdasarkan pendapat tersebut, E-Voting adalah campuran antara teknologi dan demokrasi yang bertujuan agar proses pemungutan suara lebih praktis dan memberi kenyamanan bagi pemilih di mana pemilih dapat memberikan suaranya dengan melalui perangkat elektronik yang diakses di rumahnya maupun datang ke tempat pemungutan suara.

Elektronik Voting mempunyai payung hukum, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 pasal 5 dijelaskan bahwa pedoman implementasi pemilihan kepala desa menggunakan e-voting pada Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 85 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui alat-alat pemilihan suara secara elektronik.

b. Metode Elektronik Voting (E-Voting)

Pelaksanaan pemilihan umum dapat dibagi menjadi dua cara yaitu dengan cara konvensional yang berbasis kertas dan dengan cara e-voting yang berbasis pada teknologi online. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, (2012) e-voting berbasis online dapat dilaksanakan dalam beberapa metode yaitu:

1. Alat pemindai optik dalam metode ini, pemilih diberikan kertas surat suara, dan hasilnya dicatat dan dihitung secara elektronik sehingga mempercepat penghitungan suara.
2. *Sistem for Direct Electronic Recording* (DRE) Pemilih mencoblos dengan menggunakan alat elektronik pada komputer atau panel/papan suara sehingga hasil perhitungan suara lebih akurat.
3. Memberikan suara secara online. Melalui komputer yang terhubung dengan jaringan pemungutan suara TPS, pemilih dapat mencoblos di mana saja. Komunikasi data pita aman di seluruh jaringan diperlukan untuk metode ini.

c. Penerapan Elektronik Voting Melalui Aplikasi (E-Voting)

Tahapan yang disebut penting dari sebuah planning atau rancangan yang sudah didesain artinya implementasi (penerapan). Tanpa adanya implementasi, tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai, menggunakan kata lain bahwa implementasi artinya tahapan dimana suatu planning atau rancangan bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan yang

diinginkan tercapai. Kata penerapan dari berasal kata terap yakni mempunyai arti menjalankan atau melakukan suatu kegiatan proses atau cara menjalankan atau melakukan sesuatu, baik secara tak berbentuk atau sesuatu yang kongkrit.

Implementasi (penerapan) merupakan suatu proses penerapan ide dalam suatu tindakan sehingga dapat memberi akibat yang baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai serta perilaku. *Dalam oxford advance learners dictionary*, dikemukakan bahwa penerapan merupakan “*put something into effect*”, yang berarti penerapan yang menyampaikan dampak. Penerapan artinya sebuah tindakan yang dilakukan secara individu atau grup guna untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Secara bahasa adalah cara, hal atau akibat. Sedangkan berdasarkan Ali, penerapan merupakan pelaksanaan, atau pelaksanaan. berdasarkan Riant Nugroho, penerapan merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan adalah suatu prosedur atau tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mengenai unsur-unsur pelaksanaan, yaitu:

- 1) Adanya implementasi, baik individu maupun organisasi bertanggung jawab atas manajemen, implementasi, atau pengawasan;
- 2) Adanya program yang berjalan;
- 3) Adanya kelompok sasaran, atau masyarakat yang menjadi tujuan dan diharapkan mendapat manfaat dari program tersebut.

Teknik untuk memberikan suara dalam pemilihan telah berkembang pesat, bahwa tata cara dalam pemilihan telah diperluas dari sebelumnya menggunakan cara konvensional atau manual menjadi elektronik. Yang sebelumnya masih menggunakan hak pilih yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan surat suara kertas menjadi mesin pemilihan, yang disebut dengan elektronik voting atau e-voting.

Menurut Kersting dan Baldersheim, e-voting dapat diartikan sebagai pelaksanaan hak pilih seseorang dalam suatu pemilihan yang didukung

dengan sarana elektronik. Pemungutan suara elektronik (E-Voting) adalah metode pengumpulan suara menggunakan perangkat elektronik.

d. Kebijakan Sistem Elektronik Voting (E-Voting)

Model implementasi kebijakan e-voting George C. Edward III (Implementing Public Policy, 1980) mengidentifikasi empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Pemrogram dan audiens target berkomunikasi secara efektif.

2. Sumber daya

Kuantitas dan kualitas sumber daya keuangan dan sumber daya manusia didukung.

3. Sikap

Dibutuhkan kualitas seperti kejujuran, komitmen, dan demokrasi yang terkait erat dengan orang yang mengimplementasikan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Meliputi penerapan struktur dan mekanisme organisasi melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam pedoman kebijakan.

5. Partisipasi Demokratis

Dalam rangkaian penyusunan program, diperlukan partisipasi masyarakat. Pembangunan hukum secara implisit mengandung prakarsa dan faktor yang berkembang dari masyarakat itu sendiri, sedangkan pemerintah berperan dalam mempertimbangkan pengaduan masyarakat (Rachmat Trijono, 2013, hlm. 72).

Demokrasi berasaskan kesetaraan, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki prinsip hak yang sama dan mendapat tempat dalam pemerintahan karena rakyat menguasai negara. Legitimasi dan legalitas kekuasaan negara bersumber dari kekuasaan rakyat ini (Gaffar, 2013, hlm. 1).

e. Manfaat Sistem Elektronik Voting (E-Voting)

Tujuan dari mesin pemungutan suara elektronik adalah untuk mempercepat proses perhitungan dan mengurangi kesalahan. Berikut beberapa keuntungan menggunakan e-voting:

- 1) Mempercepat penghitungan suara;
- 2) Hasil penghitungan suara yang lebih tepat;
- 3) Hemat biaya pengiriman surat pemungutan suara;
- 4) Hemat biaya pencetakan surat pemungutan suara;
- 5) Kertas polling dapat dibuat dalam beberapa terjemahan bahasa;
- 6) Berikan akses ke lebih banyak data sehubungan dengan keputusan suara;
- 7) Berikan penerimaan yang lebih baik kepada orang-orang yang memiliki kendala aktual (cacat);
- 8) Berikan akses untuk orang yang memiliki keterbatasan waktu untuk pergi ke tempat survei (TPS);
- 9) Memiliki kendali atas pihak yang tidak memenuhi syarat untuk memilih misalnya individu yang masih di bawah umur.

f. Keunggulan Sistem Elektronik Voting (E-Voting)

Terlepas dari fakta bahwa elektronik voting sebagai suatu produk kemajuan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem elektronik voting ini tidak seutuhnya sempurna. Berikut keunggulan dan kelemahan sistem Elektronik Voting:

- 1) Penghitungan suara menjadi lebih mudah, dengan penggunaan sistem elektronik voting di dalam proses pemungutan suara mempermudah ketika mengkalkulasi data suara. Karena proses penghitungan dilakukan oleh sistem.
- 2) Mempermudah proses pelaksanaan pemilihan, penggunaan teknologi pada sistem elektronik voting menekan angka golput karena pada dasarnya sistem dirancang hanya untuk menerima dan menghitung suara. Dalam proses pemilihan, sistem elektronik voting hanya memperbolehkan pemilih memilih satu kali dan tidak bisa untuk tidak memilih.

- 3) Mencegah praktik kecurangan, dengan sistem elektronik voting mampu menekan dan meminimalisasi tindakan kecurangan yang biasa ditemukan dengan penggunaan pemungutan suara dengan kertas. Maraknya ditemukan kertas yang sudah cacat atau telah terisi dan manipulasi data. Elektronik Voting sendiri segala sesuatunya baik masuknya data suara dan penghitungan data suara semuanya telah terlacak oleh sistem.
- 4) Menurunkan biaya, sistem elektronik voting mampu mengecilkan pengeluaran biaya yang seharusnya dikeluarkan pada saat pemilu, karena pelaksanaan elektronik voting sendiri hanya memerlukan perangkat elektronik. Berbeda dengan pemilu konvensional yang memerlukan kertas.

Menurut Zafar & Pilkjaer dalam Priyono & Dihan (2010b, hlm. E57) menyebutkan beberapa manfaat penerapan sistem Elektronik Voting, yaitu:

- 1) Biaya: terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibandingkan dengan sistem tradisional yang ribet, kompleks dan tidak efisien
- 2) Waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang tradisional
- 3) Hasil: terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus human error selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan
- 4) Transparansi: terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real time online. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa menggunakan elektronik voting memberikan cukup biaya kelebihan dibandingkan menggunakan pemilu konvensional. Pasalnya sesuai uraian kutipan diatas elektronik voting bisa menurunkan anggaran dikarenakan mampu mereduksi pemakaian kertas menjadi tidak dibutuhkan sama sekali dan keperluan logistik lainnya. Kemudian

menggunakan penggunaan elektronik voting bisa berhemat saat, karena proses penghitungan bunyi, jadi lebih cepat serta sempurna. Pengolahan data bunyi serta yang akan terjadi akhir bisa dihasilkan pada ketika pelaksanaan pemilihan.

g. Kekurangan Sistem Elektronik Voting (E-Voting)

- 1) Kurangnya transparansi;
- 2) Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya;
- 3) Memerlukan sertifikasi sistem, tapi standar sertifikasi tidak disepakati secara luas;
- 4) Resiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar;
- 5) Dapat berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan;
- 6) Kemungkinan kecurangan dengan manipulasi besar-besaran oleh orang dalam;
- 7) Meningkatnya biaya baik pembelian maupun pemeliharaan sistem e-voting;
- 8) Meningkatnya persyaratan infrastruktur dan lingkungan;
- 9) Meningkatnya persyaratan keamanan untuk melindungi sistem pemberian suara selama dan antara pemilu ke pemilu selanjutnya termasuk selama pengangkutan, penyimpanan dan pemeliharaan;
- 10) Kemungkinan perhitungan ulang terbatas;
- 11) Kebutuhan untuk kampanye tambahan bagi pendidikan pemilih.

3. Majelis Perwakilan Kelas (MPK)

a. Pengertian Majelis Perwakilan Kelas (MPK)

MPK merupakan kepanjangan dari Majelis Perwakilan Kelas. Majelis Perwakilan Kelas (MPK) ialah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Majelis Perwakilan Kelas (MPK)

merupakan satu-satunya organisasi di sekolah yang dapat memantau, mengawasi dan membantu tugas-tugas dari OSIS.

Majelis Perwakilan Kelas (MPK) berasal dari perwakilan resmi dari masing-masing kelas yang dipilih sesuai musyawarah kelas serta disetujui oleh wali kelas. Anggota Majelis Perwakilan Kelas (MPK) boleh berasal dari koordinator kelas atau nama baru hasil musyawarah kelas.

b. Dasar Hukum Majelis Perwakilan Kelas (MPK)

- 1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) PP Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pertengahan Nasional;
- 5) Kep. Mendikbud Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 6) Kep. Dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/0/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan;
- 7) Keputusan Dirjen PDM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 239/C/KEP/N/81 tanggal 18 Agustus 1981.

c. Tugas dan Wewenang Majelis Perwakilan Kelas (MPK)

Tugas dan wewenang Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dalam Keputusan Dirjen PDM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 239/C/KEP/N/81 tanggal 18 agustus 1981 yaitu:

- 1) Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas;
- 2) Mengajukan usul keaktifan untuk dibuat susunan sebagai program program kerja OSIS;
- 3) Menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS;
- 4) Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada belakang jabatannya;
- 5) Mempertanggungjawabkan segala tugas kepada Kepala Sekolah selangku Ketua Pembina;

- 6) Bersama-sama pengurus menyusun Aturan dasar dan aturan Rumah Tangga dalam sidang umum;
- 7) Mengawasi Kinerja OSIS.

d. Perangkat Majelis Perwakilan Kelas (MPK)

Sebagai organisasi yang berada di lingkungan sekolah, Majelis Perwakilan Kelas (MPK) sebenarnya memiliki struktur organisasi yang berbeda masing-masing sekolah tetapi pada dasarnya sama dengan organisasi umumnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Umumnya struktur kepengurusan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) yaitu:

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua;
- 3) Sekretaris;
- 4) Wakil Sekretaris;
- 5) Bendahara;
- 6) Wakil Bendahara;
- 7) Komisi A (Menangani BPH OSIS);
- 8) Komisi B (Menangani Sekbid 1 s.d 4);
- 9) Komisi C (Menangani Sekbid 5 s.d 8).

Menjabat selama 1 (satu) tahun periode, namun bentuk di tiap sekolah berbedabeda.

4. Demokrasi

a. Makna Demokrasi

Demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara bahasa demos-cretein atau democ-ratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam

keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Menurut Joseph A. Schemer Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli masyarakat, dan tanggung jawab adalah salah satu nilai yang menurut Kementerian Pendidikan Nasional penting untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pendidikan karakter demokratis merupakan salah satu dari 18 nilai yang ada.

Demokratis dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati dalam menghadapi perbedaan pandangan. Sudut pandang yang berbeda pun tidak hanya ditolak tetapi didorong untuk secara terbuka menyetujui dan menghormati satu sama lain dalam menghadapi perbedaan tersebut.

Dewey mendefinisikan demokrasi adalah "*Democracy is extension in space of the number of individualis who participate in a interest*". Demokrasi adalah memberikan kekuasaan, tempat kepada individu untuk berperan dalam sebuah minat atau suatu keinginan.

Affan Ghaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatife) dan empirik (demokrasi empirik):

- a. Demokrasi Normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara.
- b. Demokrasi Empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung arti bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk juga dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara akan menentukan kehidupan rakyat.

b. Hakikat Demokrasi

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*ligimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.

2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (sosial kontrol) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).

3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam menyampaikan aspirasi bail melalui pers maupun langsung, pemerintah diharuskan dapat menjamin adanya kebebasan yang seluas-luasnya kepada rakyat.

c. Nilai-Nilai Karakter Demokratis

Proses hominisasi dan humanisasi dapat digunakan untuk menggambarkan proses pendidikan nasional. Karena demokrasi terutama didasarkan pada nilai-nilai dan bukan hanya prosedur atau struktur pemerintahan. Demokrasi dibangun di atas sejumlah nilai yang semuanya mengakui harkat dan martabat manusia.

Menurut Henry B. Mayo, nilai-nilai karakter demokrasi tersebut diantaranya:

- 1) Perselisihan harus diselesaikan secara damai dan institusional;
- 2) Perubahan harus dilaksanakan secara damai dan dalam masyarakat yang sedang berubah;
- 3) Perubahan kepemimpinan reguler harus diatur;
- 4) Kekerasan harus dijaga seminimal mungkin;
- 5) Keanekaragaman harus diakui dan diterima begitu saja;
- 6) Keadilan harus ditegakkan.

Menurut Srijanti, agar masyarakat beriman pada sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi pedoman atau norma atau nilai-nilai demokrasi. Berikut ini diperlukan untuk nilai-nilai demokrasi:

1) Kesadaran Pluralisme

Dalam masyarakat demokratis, keragaman penduduk harus seimbang. Hak dan kewajiban setiap warga negara seimbang dalam demokrasi. Kemudian, sebagai bangsa dengan berbagai potensi suku, bahasa, budaya, agama, dan alam.

2) Sikap Jujur dan Pikiran Sehat

Musyawarah dan mufakat adalah dasar pengambilan keputusan, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dipertimbangkan. Dalam demokrasi, pengambilan keputusan membutuhkan kejujuran, logika atau akal sehat, dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Agar demokrasi berfungsi, setiap orang harus tulus dan percaya pada Kebaikan.

3) Demokrasi Membutuhkan Kerja Sama, Sikap, dan Itikad Baik Warga

Membuat keputusan yang disepakati semua pihak membutuhkan kerja sama warga. Demokrasi gagal ketika publik terkotak-kotak dan curiga terhadap orang lain.

4) Demokrasi Membutuhkan Kedewasaan

Demokrasi membutuhkan keterbukaan terhadap kemungkinan kekalahan atau kompromi dalam pengambilan keputusan. Semangat demokrasi mensyaratkan warga negara bersedia memberikan kritik konstruktif dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab sebagai imbalan atas kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.

5) Demokrasi Membutuhkan Pertimbangan Moral

Demokrasi membutuhkan keyakinan bahwa cara untuk mencapai kemenangan harus sesuai dengan tujuan dan moral, tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun. Demokrasi menuntut agar pertimbangan moral atau karakter mulia menjadi standar untuk mencapai tujuan.

d. Partisipasi Demokrasi

Beberapa faktor yang mendorong suatu masyarakat berpartisipasi dalam proses partisipasi demokrasi, Plumer (Yulianti, 2012:10) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Keahlian dan pengetahuan, mempengaruhi lingkungan masyarakat untuk memahami atau menolak tahapan partisipasi saat ini.
- b. Layanan masyarakat, warga tidak dapat berpartisipasi karena konflik antara komitmen mereka untuk pekerjaan mereka dan keinginan mereka untuk melakukannya.
- c. Kemampuan seseorang dalam memahami dan melaksanakan tahapan partisipasi yang ada dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan buta aksaranya.
- d. Gender membuat asumsi bahwa laki-laki dan perempuan akan memandang suatu masalah secara berbeda.

- e. Keyakinan pada budaya tertentu Partisipasi strategi dan metode yang digunakan akan dipengaruhi oleh tingginya tingkat heterogenitas sosial, khususnya dalam hal agama dan budaya.
- f. Indikator Keberhasilan Partisipasi Demokrasi dalam Pendidikan di Sekolah

Indikator keberhasilan partisipasi demokrasi dalam pendidikan (Sri Surhayati, 2008:25).

- 1) Dari segi pemikiran, keuangan, standar moral dan material, kewibawaan, dan kebersihan, peningkatan kontribusi dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.
- 2) Meningkatnya tanggung jawab pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas masukan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- 3) Keputusan sekolah merupakan wujud nyata apresiasi dan kemampuan pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

B. Penelitian Terdahulu

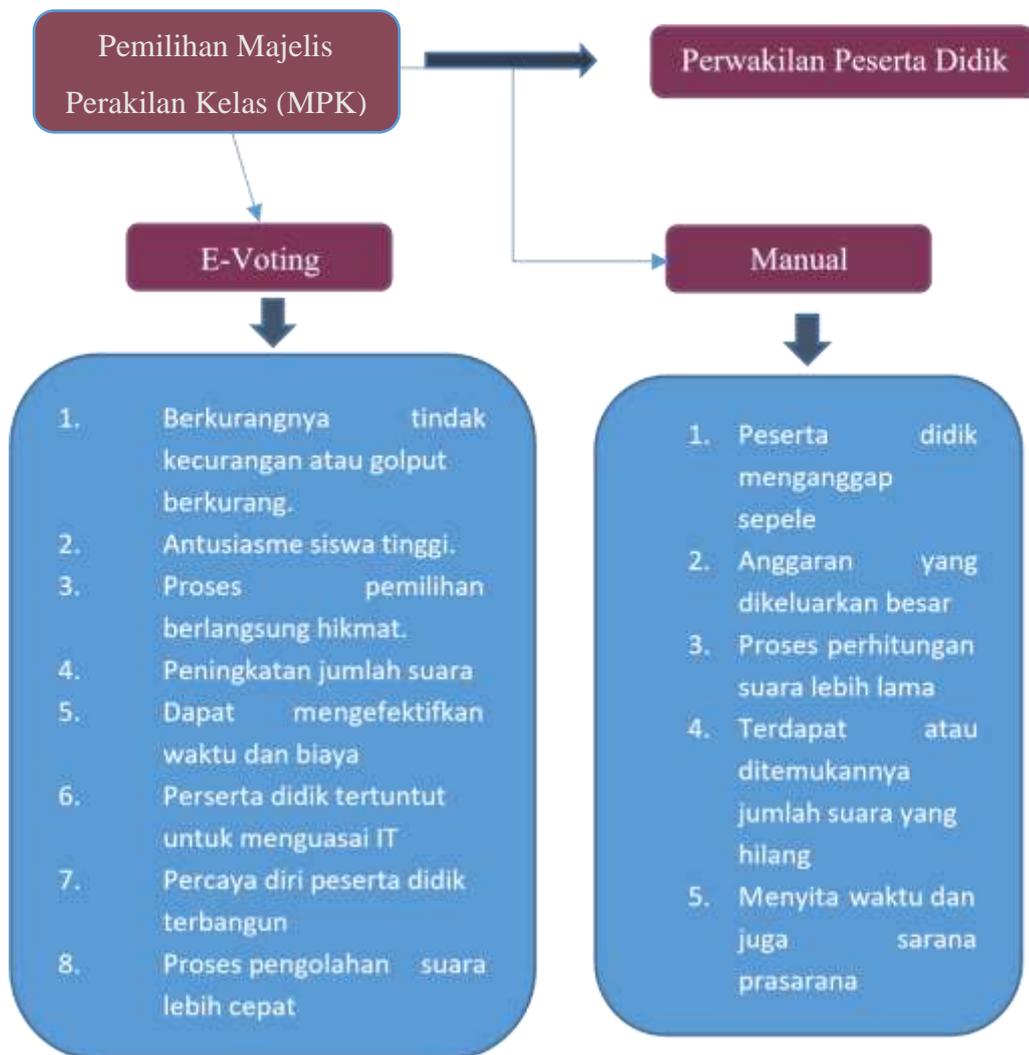
Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dulu sebelum dilakukan oleh penulis. Penelitian ini dijadikan pedoman oleh penulis agar dapat menambah lebih banyak teori yang diketahui serta dijadikan acuan atau referensi oleh penulis untuk menambah bahan kajian yang lebih banyak, dengan judul yang penulis ambil melalui skripsi dan jurnal sebagai berikut :

1. Lailiyatul Inayah (2021) dengan judul penelitian *“Penerapan E-Voting Melalui Aplikasi E-pilketos dalam menanamkan Karakter Demokrasi di SMP Negeri 3 Surabaya”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan e-voting melalui aplikasi e-pilketos di SMP Negeri 3 Surabaya merupakan penerapan atau pelaksanaan pemilihan ketua OSIS menggunakan perangkat lunak berbasis web yang terkoneksi dengan jaringan internet yang dilakukan setiap tahunnya. Tujuannya dapat memudahkan dalam proses pemilihan ketua OSIS. Serta adanya penanaman karakter demokrasi pada Penerapan E-Voting Melalui Aplikasi E-pilketos ini adalah agar menjadi peserta didik yang berperilaku baik dan sopan, agar peserta didik mampu mencerminkan sikap kepemimpinannya, dan juga menjadi peserta didik yang lebih cerdas.
2. Nur Indah Sari Amir (2019) dengan judul penelitian *“Pengaruh Metode E-Voting Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng”*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh metode evoting terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Metode e-voting di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng masuk dalam kategori baik. Berdasarkan dari 3 (tiga) indikator yaitu sistem pemindaan optik, sistem direct recording electronic, dan internet voting rata-rata responden atau masyarakat sebesar 53,08% memberikan pernyataan setuju.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep pemikiran yang menjelaskan secara garis besar alur penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2023)

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang sifatnya sementara. Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Adapun dalam penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui efektivitas elektronik voting dalam pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Sebagai Wujud Demokrasi Di Sekolah.

Berikut perumusan hipotesis statistik adalah sebagai berikut :

$H_0 : \rho = 0, 0$ berarti tidak adanya hubungan

$H_a : \rho \neq 0$, berarti melebihi ataupun dibawah nol artinya adanya hubungan

ρ = nilai korelasi di formulasi yang dihipotesiskan

H_0 : Tidak adanya efektivitas penerapan sistem elektronik voting dalam pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan wujud demokrasi di sekolah

H_a : Adanya efektivitas penerapan sistem elektronik voting dalam pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan wujud demokrasi di sekolah